

# PENENTUAN NEGARA PRIORITAS PENGEMBANGAN ATDAG DAN ITPC MELALUI METODE ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS

## *Determining Priority Development Countries of ATDAG and ITPC Using Analytical Hierarchy Process*

**Hasni, Fitria Faradila**

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI,  
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat,  
e-mail: hasni.melati@gmail.com

Naskah diterima: 01/12/2015 Naskah direvisi: 25/01/2016 Disetujui diterbitkan: 25/03/2016

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kriteria-kriteria penentuan negara prioritas untuk pengembangan Atase Perdagangan (Atdag)/*Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC), dan mengidentifikasi negara-negara prioritas untuk mengembangkan Atdag/ITPC yang sudah ada atau mendirikan Atdag/ITPC yang baru. Metode pengkajian yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Data sekunder bersumber dari BPS, *Fragile States Index*, *UN COMTRADE*, *World Bank* dan CEPII. Sedangkan data primer diperoleh dari kegiatan FGD dengan para pelaku ekspor, akademisi dan pejabat Disperindag Jakarta dan Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan dalam pemilihan negara prioritas Atdag dan ITPC secara berturut-turut adalah *country risk*; *commercial infrastructure*; *market growth*; *trade complementary index*; *market intensity*; *trade openness*; dan *trade cooperation*. Keberadaan Atdag dan ITPC sebagai perwakilan perdagangan berperan penting dalam peningkatan ekspor, sehingga perlu penguatan dan pengembangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan Atdag dan ITPC di 16 negara prioritas serta pembentukan Atdag dan atau ITPC baru di tiga negara prioritas, yaitu Myanmar, Swedia dan Austria.

**Kata Kunci:** Atdag, ITPC, AHP, Kriteria, Negara Prioritas

### **Abstract**

*This study aims to develop the main criteria to determine priority countries for new Trade Attaché/ITPC Representatives and to identify priority countries for further development of the Trade Attaché/ITPC Representatives. This study employs an Analytical Hierarchy Process (AHP) methodology. The secondary data were collected from the BPS, Fragile States Index, UN COMTRADE, World Bank and CEPII. The primary data were collected from qualitative research using Focus Group Discussion (FGD) with the stakeholders in Jakarta and Yogyakarta. The results showed that the main criteria for choosing countries for establishing Atdag and ITPC in sequence were country risk, commercial infrastructure, market growth, trade complementary index, market intensity, trade openness, and trade cooperation. The presence of Trade Attaché/ITPC Representative in many countries has an important role in increasing Indonesia's export. However, further efforts are required to strengthen their roles, particularly in 16 countries. This study recommends to establish trade attaché and or ITPC in three potential countries: Myanmar, Sweden and Austria.*

**Keywords:** Trade Attaché, ITPC, AHP, Criteria, Priority Countries

**JEL Classification:** C82, F13, H30, O24

## PENDAHULUAN

Peranan lembaga perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri khususnya Atase Perdagangan (Atdag) dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) mutlak diperlukan dalam pencapaian target ekspor nasional. Lembaga perwakilan perdagangan ini mengemban tugas bukan hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan promosi, namun juga dalam kerjasama, fasilitasi perdagangan, pengamatan pasar, diplomasi, *business intelligence* serta penetrasi pasar untuk berbagai produk Indonesia ke berbagai negara tujuan ekspor. Keberhasilan para perwakilan perdagangan dalam meningkatkan kinerja ekspor secara tidak langsung memiliki kontribusi yang besar terhadap pencapaian target ekspor nasional.

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia telah memiliki 23 Atase Perdagangan dan 19 *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) yang tersebar di berbagai negara mitra dagang Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2014). Berbagai studi menunjukkan bahwa peran lembaga sejenis Atdag atau ITPC cukup efektif untuk meningkatkan ekspor suatu negara, sehingga program pemerintah dalam pengembangan perwakilan sangat dibutuhkan baik dalam bentuk penguatan yang sudah ada, maupun pembentukan Atdag atau ITPC baru.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, keberadaan Atdag dan

ITPC terbukti mampu meningkatkan ekspor. Secara teoritis, Biesebroeck et al. (2010) menyebutkan bahwa salah satu hambatan pasar yang dihadapi eksportir adalah besarnya *sunk costs* yang antara lain mencakup biaya untuk memperoleh informasi pasar yang spesifik, membangun jaringan distribusi, identifikasi pelanggan, dan memahami peraturan di negara importir. Peran ini akan lebih efektif dilakukan oleh lembaga sejenis Atdag atau ITPC. Adapun menurut Nguyen (2012), salah satu faktor yang menyebabkan eksportir gagal melakukan ekspor karena eksportir cenderung memasok produk dengan spesifikasi yang sama antar negara tujuan, padahal belum tentu setiap negara tujuan mempunyai permintaan yang sama. Informasi yang asimetrik mengenai permintaan pasar tersebut akan dapat diatasi melalui penempatan Atdag/ITPC di negara tujuan. Berdasarkan Yang et al. (2012), suatu perusahaan yang fokus menasar negara lain akan terkendala dalam hal *social acceptance*, terutama dalam mencari informasi pasar di negara tujuan. Hal ini juga kerap mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Menurut Titus et al. (2013), negara berkembang membutuhkan *The Trade Promotion Organization* (TPO) untuk mengimplementasikan strategi promosi ekspor. Diplomasi perdagangan semakin tumbuh dalam kepentingan globalisasi dunia, namun masih jarang terdapat penelitian mengenai kegiatan

diplomasi perdagangan Ruel & Visser (2012).

Dampak positif lembaga sejenis Atdag dan ITPC terhadap kinerja ekspor juga disampaikan oleh Kostecki dan Naray (2007). Secara empiris Martincus dan Carballo (2008) membuktikan dampak positif dari program promosi ekspor di Peru. Rose (2007) dalam kajiannya menunjukkan bahwa setiap penambahan satu kedutaan akan meningkatkan ekspor sebesar 6%-10%. Penelitian Kang (2011) menunjukkan bahwa setiap peningkatan anggaran untuk kantor perwakilan perdagangan sebesar 10% akan meningkatkan ekspor Korea Selatan sebesar 2,45%-6,34%. Selain itu, TPO juga dapat dimanfaatkan untuk promosi ekspor sektor jasa (Olaru, 2012).

Mengingat pentingnya peranan lembaga perwakilan perdagangan ini serta keterbatasan sumberdaya dan anggaran, pemerintah perlu membuat skala prioritas dalam pengembangan Atdag dan ITPC agar ekspor dapat meningkat secara efektif dan optimal.

Hingga saat ini, pemerintah belum mempunyai skala prioritas dalam pengembangan Atdag dan ITPC. Penentuan Atdag maupun ITPC dilakukan berdasarkan usulan tanpa mempedulikan skala prioritasnya. Dengan demikian, adanya kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk pemilihan negara untuk Atdag dan ITPC, dapat membantu pemerintah dalam menyusun skala prioritas negara-negara prioritas untuk Atdag dan ITPC. Studi

sebelumnya, seperti oleh Martincus dan Carballo (2008) serta Rose (2007), bersifat global atau spesifik negara lain, namun tidak spesifik untuk Atdag dan ITPC. Sementara itu, studi oleh Ruël dan Zuiderma (2012) adalah studi kasus diplomasi ekonomi untuk negara Belanda. Ferreira dan Teixeira (2011) disisi lain lebih menekankan analisis pada model kelembagaan yang efektif untuk peningkatan ekspor dengan kasus Portugal dan Irlandia. Meskipun demikian penelitian Justinek dan Sidej (2012) menyimpulkan bahwa sulit untuk mengukur secara langsung dukungan promosi ekspor terhadap peningkatan ekspor.

Berdasarkan hasil *Mapping Reposisi* Perwakilan Perdagangan RI di Luar Negeri dibandingkan dengan beberapa perwakilan luar negeri yang dimiliki beberapa negara tetangga, kemampuan Atdag dan ITPC masih lemah ditinjau dari jumlah dan kelengkapan operasional organisasi. Dari sisi sumber daya manusia masih sangat terbatas dengan jumlah rata-rata hanya 1 hingga 4 orang dan dari 23 Atdag yang ada, 21 diantaranya tidak memiliki *home staf* (Kementerian Perdagangan, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015), terdapat beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja ITPC dalam mempromosikan ekspor Indonesia. Kendala internal mencakup anggaran yang terbatas, kekurangan SDM dan hambatan koordinasi. Sementara kendala eksternal berasal

dari ketidaksiapan industri di Indonesia dan saluran distribusi ekspor karena infrastruktur logistik yang kurang memadai.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan studi ini ada dua yaitu mengembangkan kriteria-kriteria penentuan negara prioritas untuk pengembangan Atdag/ITPC dan mengidentifikasi negara-negara prioritas untuk mengembangkan atau mendirikan Atdag /ITPC yang baru. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah berupa negara yang diusulkan untuk pembukaan Atdag dan ITPC baru.

## METODE

Data yang digunakan dalam analisis terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan FGD yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 dan Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2015 guna memperoleh bobot kriteria prioritas dan bobot negara prioritas. Peserta FGD adalah para

pelaku ekspor, akademisi dan pejabat Disperindag yang biasa menghadapi permasalahan ekspor di daerah. Sebelum dilakukan pembobotan terlebih dahulu dilakukan konfirmasi terhadap calon kriteria pemilihan negara yang diajukan. Hal ini untuk memastikan bahwa kriteria-kriteria pemilihan negara prioritas untuk pengembangan Atdag/ITPC dapat teridentifikasi secara komprehensif.

Negara yang digunakan dalam analisis AHP diseleksi melalui pangsa PDB minimal sebesar 0,5% dari total PDB dunia. Selain itu, negara-negara ASEAN juga diikutsertakan dalam analisis mengingat pada akhir 2015, Indonesia akan menghadapi MEA, sehingga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke sesama negara ASEAN, pembukaan Atdag dan ITPC di negara-negara ASEAN juga perlu dipertimbangkan. Dengan pendekatan tersebut, terpilih 39 negara yang akan dianalisis seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Daftar Negara Terpilih Untuk Analisis AHP**

No	Negara	PDB 2013 (USD Triliun)
1	Amerika Serikat	16,768.1
2	RRT	9,469.1
3	Jepang	4,898.5
4	Jerman	3,636.0
5	Perancis	2,807.3
6	Inggris	2,523.2
7	Brazil	2,246.0
8	Rusia	2,096.8
9	Italia	2,072.0
10	India	1,876.8

No	Negara	PDB 2013 (USD Triliun)
11	Kanada	1,826.8
12	Australia	1,505.9
13	Spanyol	1,358.7
14	Korea Selatan	1,304.5
15	Meksiko	1,260.9
16	Belanda	853.8
17	Turki	820.0
18	Arab Saudi	748.5
19	Swiss	650.4
20	Argentina	610.3
21	Swedia	558.95
22	Nigeria	521.81
23	Polandia	517.71
24	Norwegia	512.58
25	Belgia	508.28
26	Austria	416.06
27	Uni Emirat Arab	402.34
28	Thailand	387.25
29	Kolombia	378.42
30	Iran	367.10
31	Afrika Selatan	350.80
32	Malaysia	313.16
33	Singapura	297.94
34	Pilipina	272.07
35	Vietnam	170.57
36	Myanmar	56.76
37	Brunei Darussalam	16.11
38	Kamboja	15.51
39	Laos	10.79

Sumber: World Bank, 2015

Setelah kriteria pemilihan negara ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah pemberian penilaian prioritas atau pemberian skor/bobot untuk setiap elemen kriteria yang dipasang-pasangkan. Pemberian bobot tersebut

diberikan berdasarkan penilaian subyektif peserta diskusi. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti *Fragile States Index*, UN COMTRADE, World Bank, *Logistic Performance Index* serta BPS.

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yakni Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Saaty (1987) merupakan salah satu instrumen yang dinilai cukup efektif dalam membantu para pemangku kebijakan untuk dapat menetapkan prioritas sehingga didapat keputusan terbaik. Metode AHP juga merupakan metode pengambilan keputusan yang paling banyak digunakan dan telah diaplikasikan dalam berbagai bidang.

Beberapa contoh penelitian yang menggunakan metode AHP antara lain Abu-Sarhan (2011) yang menerapkan metode AHP untuk menyeleksi sistem informasi terbaik untuk *Reengineering Projects*. Sementara di bidang ekologi, Barzekar *et al.* (2011) menyusun prioritas dan ranking indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan (*sustainability*) dari Ecotourism di Iran dengan menggunakan metode AHP; selanjutnya Chamodrakas *et al.* (2010), Chakraborty *et al.* (2011), Ngatawi dan Setyaningsih (2011), Ozkan *et al.* (2011) dan Mardhikawarih *et al.* (2012) menggunakan metode AHP untuk pemilihan *vendor* atau *supplier* terbaik. Di bidang pendidikan, Juliyanti (2011) menggunakan metode AHP untuk melakukan pemilihan guru berprestasi dan Setyawan (2014) dalam memutuskan lokasi investasi perumahan. Dalam bidang perdagangan dalam negeri, Prabowo (2014) menggunakan metode AHP untuk memilih komoditas

yang masuk dalam bahan pangan pokok prioritas.

Dalam AHP terdapat sekumpulan opsi alternatif yang akan dievaluasi dengan menggunakan beberapa variabel atau kriteria. Prinsip kerja AHP adalah berupa simplifikasi dari keputusan yang bersifat kompleks dan tidak terstruktur menjadi elemen-elemen (kriteria dan opsi alternatif). Elemen-elemen tersebut disusun secara hierarki untuk kemudian tingkat kepentingan setiap elemen diberikan skor atau bobot secara subyektif terkait tingkat prioritas dari suatu elemen secara relatif dibandingkan dengan elemen yang lain pada tingkatan yang sama dan juga terkait dengan elemen yang berada pada satu tingkat di atasnya (Marimin, 2004). Oleh karena itu, keandalan analisis dengan menggunakan metode AHP sangat bergantung pada persepsi subyektif manusia yang dianggap sebagai ahli representatif di bidangnya sebagai input utama dalam menentukan prioritas.

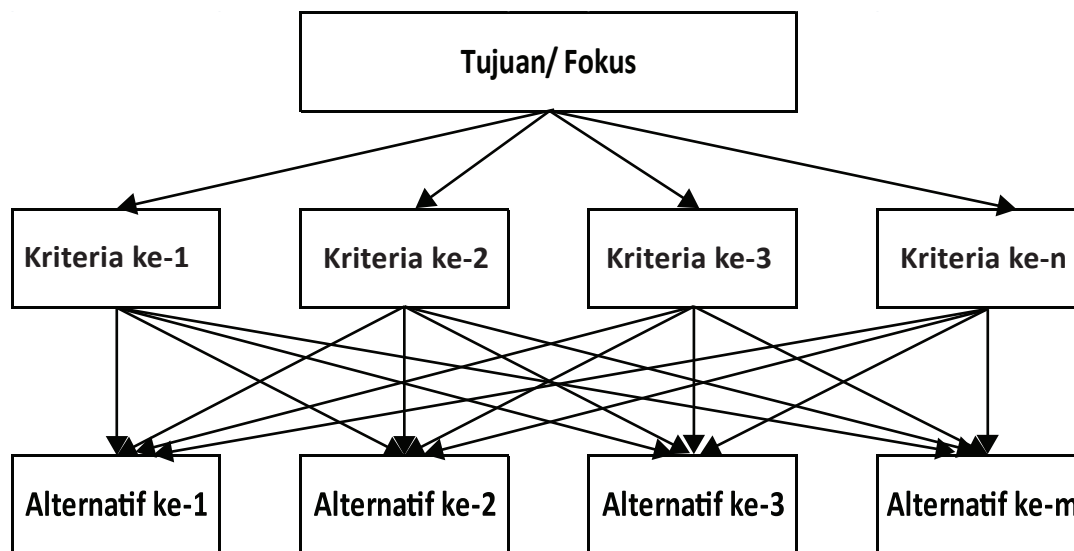
Dalam analisis AHP, tahapan-tahapan yang digunakan antara lain:

- a. *Decomposition*, setelah permasalahan didefinisikan, maka perlu dilakukan dekomposisi yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi beberapa unsur-unsur yaitu tujuan (*goal*) dari suatu kegiatan, perumusan kriteria (*criteria*) untuk memilih prioritas dan identifikasi pilihan-pilihan atau alternatif (*options*).
- b. *Comparatif Judgement*, prinsip ini berarti membuat penilaian prioritas antara 2 elemen yang dipasangkan

pada satu tingkatan tertentu berdasarkan atau berkaitan dengan tingkat yang terdapat di atasnya. Penilaian ini merupakan bagian yang paling penting dalam metode AHP. Hasil penilaian tersebut dapat disajikan melalui matrik *pairwise comparison*.

c. *Synthesis of Priority*, melakukan sintesis terhadap prioritas.

Struktur hirarki pada metode AHP dengan kriteria sebanyak  $n$  dan terdapat jumlah alternatif sebanyak  $m$  dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hirarki Pada Metode AHP

Sumber: Saaty (1987)

### Metode AHP untuk Menentukan Negara Prioritas Pengembangan Atdag/ITPC

Pada pemilihan negara prioritas penempatan perwakilan perdagangan luar negeri baik untuk Atdag maupun ITPC, pemangku kebijakan dihadapkan dengan berbagai pertimbangan yang cukup rumit dan kompleks. Penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan negara prioritas pengembangan Atdag/ITPC juga berdasarkan pada tiga prinsip penting dasar dalam pemilihan prioritas yaitu *decomposition*, *comparatif judgement* dan *synthesis of priority*.

### *Decomposition* (Dekomposisi Permasalahan)

Langkah pertama yang dilakukan dalam tahapan ini adalah mendefinisikan masalah dan kemudian menterjemahkannya ke dalam beberapa elemen yaitu tujuan (*goal*) yang menjadi fokus utama. *Goal* ini akan menentukan kriteria yang digunakan dalam menentukan lokasi prioritas serta alternatif lokasi penempatan perwakilan perdagangan luar negeri. Fokus utama yang menjadi tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kinerja ekspor non migas Indonesia.

Setelah fokus atau tujuan yang ingin dicapai telah didefinisikan, selanjutnya adalah menentukan kriteria pemilihan lokasi perwakilan perdagangan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk membuat proses AHP menjadi dapat dikelola (*managable*), maka alternatif (negara yang menjadi lokasi prioritas) serta kriteria pemilihan lokasi prioritas perlu untuk dibatasi mengingat jumlah negara yang cukup banyak. Negara yang akan dianalisis lebih lanjut dan menjadi alternatif lokasi prioritas bagi pendirian perwakilan perdagangan luar negeri dijangar atau diseleksi terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa indikator menjadi “*m*” negara prioritas. Indikator yang digunakan adalah negara yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) minimal 0,5% dari total PDB dunia.

Sementara itu, untuk kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi dibatasi hanya menjadi “*n*” kriteria yang diadopsi dari 7 kriteria yang digunakan dalam pengukuran *Market Potential Index* (Global EDGE, 2011), sementara “*n-7*” kriteria lainnya yang akan diperoleh dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan peserta yaitu para pelaku ekspor, akademisi dan pejabat Disperindag setempat pada tanggal 28 April 2015 di Jakarta dan 20 Mei 2015 di Yogyakarta, sebagaimana berikut:

a. *Partial Trade openness* menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara. Kriteria ini diukur dari rasio antara impor dengan GDP yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan perdagangan negara

tersebut semakin terbuka, terutama dari sisi impor;

- b. *Trade Complementary Index* yaitu indeks yang mengukur kesesuaian ekspor Indonesia dengan impor negara tujuan. Indeks ini berkisar antara 0 sampai 100. Semakin mendekati angka 100, maka ekspor Indonesia semakin *match* (sesuai) dengan impor mitra dagangnya;
- c. *Market Growth Rate* adalah tingkat pertumbuhan pasar yang diukur dari besarnya peningkatan permintaan rata-rata impor selama lima tahun terakhir. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar pertumbuhan pasar di negara tersebut;
- d. *Market Intensity* adalah kemampuan daya beli yang diukur dengan besarnya pangsa belanja sektor swasta (investasi dan konsumsi) dalam GDP. Kisaran nilai untuk kriteria ini yakni 0 hingga 100. Semakin tinggi angka tersebut, mengindikasikan semakin besar daya beli negara tersebut;
- e. *Commercial Infrastructure* yang diukur dengan *Logistic Performance Index* (LPI) menunjukkan tingkat pemakaian infrastruktur komersil suatu negara. Kriteria ini berkisar pada angka 1 hingga 5. Semakin mendekati 5, semakin bagus infrastruktur negara tersebut;
- f. *Country Risk* (resiko pasar) adalah faktor resiko investasi, penetrasi pasar yang telah dilakukan pemerintah yang diukur dengan *Fragile State Index*. Nilai kriteria *Country Risk* berkisar antara 0 sampai 120. Semakin mendekati



angka 120, semakin beresiko tinggi untuk berinvestasi di negara tersebut;

g. *Trade Cooperation* yang diukur dengan ada tidaknya *Free Trade Agreement (FTA)*, *Preferential Trade Agreement (PTA)*, *Custom Union*, *Common Market* dan *Economic Community* antara Indonesia dengan negara tersebut. Urutan tingkat kerjasama paling tinggi adalah *Custom Union*, *Common Market* dan *Economic Community*; FTA dan PTA. Semakin terintegrasi bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan dengan negara mitra dagang maka semakin tinggi skornya.

Beberapa kriteria penentuan negara prioritas diadopsi dari *Market Potential Index* yang disusun oleh *International Business Center* di *Michigan State University (MSU)* untuk mengukur dan mengurutkan potensi pasar dari negara-negara *emerging market*. Kriteria-kriteria tersebut antara lain *market growth rate*, *market intensity*, *commercial infrastructure*, dan *country risk*. Selain itu, beberapa kriteria lain seperti *trade openness*, *trade complementary index*, dan *trade cooperation* ditambahkan untuk melengkapi kriteria yang sudah ada. Penambahan kriteria tersebut terutama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayakawa *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa beberapa pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan lokasi/negara penempatan *export promotion agency (EPA)* antara

lain dengan melihat hubungan politik kedua negara (*geo-politikal*), faktor sosial-ekonomi suatu negara serta level perdagangan antara kedua negara.

### **Comparatif Judgement**

Setelah permasalahan telah berhasil didekomposisi, maka langkah selanjutnya adalah pemberian penilaian prioritas atau pemberian skor/bobot untuk setiap elemen (kriteria dan alternatif negara) yang dipasang-pasangkan. Pemberian bobot tersebut diberikan berdasarkan penilaian subyektif dari para ahli dengan mempertimbangkan tujuan (*goal*) dan fokus yang hendak dicapai yaitu peningkatan ekspor non migas Indonesia.

Namun demikian, beberapa penelitian seperti Bourgeois (2005) dan Susila & Munadi (2007) menyebutkan bahwa pemberian skor secara *reciprocals* tersebut dinilai kurang logis karena perbedaan skor antara elemen satu dan yang lain yang diperbandingkan cukup besar. Skala penilaian yang ditawarkan oleh Bourgeois (2005) adalah dari 0,2 sampai dengan 1,8 dan dinilai lebih logis karena jarak yang tidak terlalu jauh. Tabel 2 berikut menyajikan skor penilaian menurut Bourgeois (2005). Oleh karena itu, kajian ini menggunakan skor pembobotan yang diperkenalkan oleh Bourgeois (2005) sehingga didapatkan hasil yang relatif lebih valid dan logis.

**Tabel 2. Skor Penilaian Kriteria**

Hasil Penilaian	Nilai A	Nilai B
A jauh lebih disukai dari B	1.4	0.6
A sedikit lebih disukai dari B	1.2	0.8
A sama dengan B	1	1
A sedikit kurang disukai dari B	0.8	1.2
A jauh kurang disukai dari B	0.6	1.4

Sumber: Bourgeois (2005)

Dengan menggunakan skor kriteria dapat disusun sebagai berikut penilaian seperti pada Tabel 1, maka (Tabel 3): matriks *pairwise comparison* untuk “n”

**Tabel 3. Matriks *Pairwise Comparison* untuk “n” Kriteria**

Kriteria	$C_1$	$C_2$	$C_3$	...	$C_n$	Jumlah	Bobot
$C_1$	-	$C_{12}$	$C_{13}$	...	$C_{1n}$	$C_{1.}$	$bc_1 = C_{1.}/C$
$C_2$	$C_{21}$	-	$C_{23}$	...	$C_{2n}$	$C_{2.}$	$bc_2 = C_{2.}/C$
$C_3$	$C_{31}$	$C_{32}$	-	..	$C_{3n}$	$C_{3.}$	$bc_3 = C_{3.}/C$
...	...	...	...	-	...	...	...
$C_n$	$C_{41}$	$C_{42}$	$C_{43}$	...	$C_{nn}$	$C_{4.}$	$bc_n = C_{n.}/C$
<b>Jumlah</b>	$C_{.1}$	$C_{.2}$	$C_{.3}$	...	$C_{.n}$	<b>C</b>	

Keterangan:

$C_{ij}$ : hasil penilaian/perbandingan antara kriteria i dengan j;  $C_{i.}$  merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki kriteria ke i;  $C$ : penjumlahan semua nilai  $C_{i.}$ ;  $BC_i$ : Bobot kriteria ke i diperoleh dengan membagi nilai  $C_{i.}$  dengan C.

Setelah didapatkan skor penilaian untuk kriteria evaluasi, kemudian dilakukan skor penilaian terhadap “m” alternatif negara prioritas berdasarkan “n” kriteria. Pembobotan dilakukan dengan cara yang sama yaitu membuat

matrik *pairwise comparison* untuk tiap pasangan alternatif berdasarkan tiap-tiap “n” kriteria. Tabel 4 mengilustrasikan matrik perbandingan antar negara alternatif untuk kriteria satu ( $C_1$ ).

**Tabel 4. Pairwise Comparison untuk “m” Alternatif Negara Prioritas Berdasarkan Kriteria 1**

<b>Kriteria 1 (C1)</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>...</b>	<b>Am</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Bobot</b>
A1	-	A12	A13	...	A1m	A1.	ba11=a1./a
A2	A21	-	A23	...	A2m	A2.	ba21=a2./a
A3	A31	A32	-	...	A3m	A3.	ba31=a3./a
...	...	...	...	-	...	...	...
Am	A41	A42	A43	...	Amm	A4.	bam1=am./a
<b>Jumlah</b>	<b>A.1</b>	<b>A.2</b>	<b>A.3</b>	<b>...</b>	<b>A.m</b>	<b>A</b>	

Keterangan:

$A_{ij}$ : hasil penilaian/perbandingan antara alternatif i dengan j berdasarkan kriteria 1;  $A_i$ : merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki alternatif ke-i;  $A$ : penjumlahan semua nilai  $A_i$ ;  $BA_{ij}$ : Bobot alternatif ke-i berdasarkan kriteria ke-j diperoleh dengan membagi nilai  $A_{ij}$  dengan  $A_i$ .

### Synthesis of Priority

Sintesis prioritas dilakukan dengan penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap alternatif negara untuk tiap-tiap kriteria setelah kriteria evaluasi telah diberikan bobot atau skor penilaian. Secara umum, sintesis prioritas dirumuskan Ngatawi & Setyaningsih (2011) adalah sebagai berikut:

$$bA_i = \sum_{j=1}^n bA_{ij} \times bC_j \quad i = 1, 2, \dots, m \dots (1)$$

Keterangan:

$bA_i$  : Skor penilaian atau bobot alternatif ke-i

$bA_{ij}$  : Skor penilaian atau bobot alternatif ke-i berdasarkan kriteria ke-j

$bC_j$  : Skor penilaian atau bobot kriteria ke-j

Negara dengan peringkat tinggi akan diprioritaskan untuk dibuka Atdag atau ITPC baru, sementara kalau sudah ada dipertimbangkan untuk ditambah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kriteria Prioritas Dalam Menetapkan Negara untuk Atdag dan ITPC

#### a. Temuan di Jakarta

Berdasarkan hasil pembobotan kriteria prioritas negara terlihat bahwa **country risk** memiliki bobot paling besar, yaitu 0,188 dan menempati urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria utama yang perlu diperhatikan dalam memilih negara untuk membuka Atdag dan ITPC adalah negara dengan resiko politik dan resiko bisnis yang paling rendah. Pada peringkat kedua, kriteria yang penting dalam menyusun prioritas negara adalah **commercial infrastructure** yang memiliki bobot sebesar 0,167 (Tabel 5). Ekspor ke negara dengan infrastruktur yang memadai dinilai efektif dalam meningkatkan ekspor.

Kriteria *market growth* atau pertumbuhan pasar juga merupakan

kriteria penting meskipun bobotnya lebih rendah dari bobot kriteria *country risk* dan *commercial infrastructure*. Hal ini menggambarkan bahwa negara yang pertumbuhan impornya selama lima tahun terakhir cukup tinggi merupakan negara yang cocok bagi Indonesia untuk mengembangkan Atdag dan ITPC, namun harus didukung oleh resiko negara yang rendah dan infrastruktur yang baik.

Selanjutnya, kriteria kerjasama perdagangan dan *trade complementry index* berada pada prioritas keempat dan kelima dalam menentukan prioritas negara untuk mengembangkan Atdag dan ITPC. Kerjasama perdagangan dan kesesuaian antara barang yang diekspor Indonesia dengan barang yang diimpor oleh negara mitra dagang

masuk dalam kriteria pemilihan prioritas negara, namun masih kalah penting dari kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan.

Sementara itu, baik *market intensity* dan *trade openness* memiliki bobot yang sama, yaitu 0,118. Keduanya juga menjadi pilihan terakhir para peserta FGD sebagai kriteria penentuan prioritas negara. Semua negara sudah mengalami keterbukaan perdagangan sehingga peran *trade openness* sebagai salah satu kriteria dalam menentukan negara tempat pengembangan Atdag dan ITPC tidak terlalu penting. Selain itu, bagi kebanyakan pelaku usaha *trade openness* merupakan tugas pemerintah. Detail dari hasil pembobotan criteria prioritas negara hasil FGD di Jakarta diberikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Pembobotan Kriteria Prioritas Negara hasil FGD di Jakarta**

Kriteria	Trade Openness	Trade Complementary Index	Market Growth	Market Intensity	Commercial Infrastructure	Country Risk	Trade Cooperation	Total	Bobot
<b>Trade Openness</b>	1	1.2	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	5.8	<b>0.118</b>
<b>Trade Complementary Index</b>	0.8	1	0.8	1.2	0.8	0.6	0.8	6	<b>0.122</b>
<b>Market Growth</b>	1.2	1.2	1	1.2	0.8	0.6	1.4	7.4	<b>0.151</b>
<b>Market Intensity</b>	1.2	0.8	0.8	1	0.6	0.6	0.8	5.8	<b>0.118</b>
<b>Commercial Infrastructure</b>	1.4	1.2	1.2	1.4	1	0.8	1.2	8.2	<b>0.167</b>
<b>Country Risk</b>	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1	1.4	9.2	<b>0.188</b>
<b>Trade Cooperation</b>	1.2	1.2	0.6	1.2	0.8	0.6	1	6.6	<b>0.135</b>
<b>Total</b>	8.2	8	6.6	8.2	5.8	4.8	7.4	49	1

Sumber: Hasil FGD

## b. Temuan di Yogyakarta

Hasil FGD di Yogyakarta juga menunjukkan bahwa kriteria *country risk* unggul dibandingkan kriteria-kriteria yang lain. Bobot kriteria *country risk* sebesar 0,182 (Tabel 6). Dengan demikian, kriteria *country risk* secara konsisten dinilai sebagai kriteria yang paling penting dalam menentukan prioritas negara tempat Atdag dan ITPC akan dibuka atau dikembangkan.

Berbeda dari hasil FGD di Jakarta yang menempatkan *commercial infrastructure* sebagai kriteria penting setelah *country risk*, hasil di Yogyakarta menunjukkan bahwa *Trade Complementary Index* merupakan kriteria penting kedua setelah *country risk* dengan bobot sebesar 0,147. Kesesuaian pasar merupakan salah satu kriteria terpenting karena jika ada kesesuaian pasar berarti ada permintaan. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan ekspor di negara-negara yang impornya sesuai dengan produk ekspor Indonesia. Di negara-negara itulah, peran Atdag dan ITPC akan menjadi penting sehingga pengembangan pasar di negara-negara tersebut diperlukan.

Sementara itu, baik *market growth*, *market intensity*, dan *commercial*

*infrastructure* secara bersamaan memiliki bobot yang sama, yaitu sebesar 0,143 dan menempati prioritas ketiga sebagai kriteria dalam penyusunan prioritas negara pengembangan dan pembukaan Atdag dan ITPC. Menurut peserta FGD, infrastruktur merupakan cerminan dari pertumbuhan pasar di suatu negara sehingga keduanya sama penting dalam memilih negara untuk pengembangan dan pembukaan Atdag dan ITPC. *Market intensity* yang mengukur daya beli masyarakat juga salah satu kriteria penting meskipun bobotnya masih di bawah kriteria *country risk* dan *trade complementary index*.

Kriteria *trade openness* dan *trade cooperation* menempati urutan keempat dan kelima dengan bobot masing-masing sebesar 0,131 dan 0,110. Menurut peserta FGD, hampir seluruh negara sudah mengalami keterbukaan perdagangan sehingga peran kriteria tersebut dalam menentukan prioritas negara untuk pengembangan atdag dan ITPC sudah tidak terlalu penting. Sementara itu, kriteria *trade cooperation* bukanlah kriteria prioritas karena menurut peserta FGD *trade cooperation* merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi pasar yang masih tertutup (Tabel 6).

**Tabel 6. Hasil Pembobotan Kriteria Prioritas Negara hasil FGD di Yogyakarta**

Kriteria	Trade Openness	Trade Complementary Index	Market Growth	Market Intensity	Commercial Infrastructure	Country Risk	Trade Cooperation	Total	Bobot
<i>Trade Openness</i>	1	1.2	0.8	0.8	1	0.6	1	6.4	<b>0.131</b>
<i>Trade Complementary Index</i>	0.8	1	1.2	1.2	1	0.6	1.4	7.2	<b>0.147</b>
<i>Market Growth</i>	1.2	0.8	1	0.8	1	0.8	1.4	7	<b>0.143</b>
<i>Market Intensity</i>	1.2	0.8	1.2	1	1	0.6	1.2	7	<b>0.143</b>
<i>Commercial Infrastructure</i>	1	1	1	1	1	0.8	1.2	7	<b>0.143</b>
<i>Country Risk</i>	1.4	1.4	1.2	1.4	1.2	1	1.4	9	<b>0.184</b>
<i>Trade Cooperation</i>	1	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	1	5.4	<b>0.110</b>
<b>Total</b>	7.6	6.8	7	7	7	5	8.6	49	1

Sumber: Hasil FGD

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria yang dianggap penting adalah hambatan atau kriteria-kriteria yang sulit untuk dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Sebagai contoh, kriteria *country risk* atau resiko suatu negara seperti gejolak politik atau perang saudara yang terjadi di negara mitra dagang tidak dapat diintervensi oleh Indonesia. Selain itu, Indonesia juga sulit mempengaruhi kinerja infrastruktur dan pertumbuhan negara mitra dagang. Dengan demikian, *commercial infrastructure* dan *market growth* juga termasuk dalam kriteria penting yang dipilih oleh peserta FGD.

Sebaliknya, kriteria-kriteria yang dianggap tidak penting adalah kriteria-kriteria yang tidak termasuk ke dalam hambatan. Bagi peserta FGD, keterbukaan perdagangan bukan

hambatan berarti bagi kinerja ekspor Indonesia. Saat ini, hampir semua negara sudah mengalami keterbukaan perdagangan. Sementara itu, untuk mengatasi tingkat perdagangan masih tertutup yang masih dialami oleh beberapa negara, Indonesia masih dapat melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan kerjasama perdagangan. Oleh karena itu, baik *trade openness* maupun *trade cooperation* masuk ke dalam kriteria yang dianggap kurang penting dalam menentukan negara prioritas pengembangan Atdag dan ITPC.

Dengan demikian urutan kriteria prioritas dalam pemilihan negara Atdag dan ITPC adalah 1) *country risk*; 2) *commercial infrastructure*; 3) *market growth*; 4) *trade complementary index*; 5) *market intensity*; 6) *trade openness*; dan 7) *trade cooperation*.

## **Prioritas Negara Pengembangan Atdag dan ITPC**

Setelah kriteria untuk menyusun prioritas negara pengembangan Atdag dan ITPC diurutkan, maka tahap selanjutnya adalah perbandingan antar negara untuk setiap kriteria. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan penilaian terhadap setiap negara untuk masing-masing kriteria. Untuk tahap ini dilakukan proses FGD sebanyak dua kali yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Pada bagian ini akan dibahas tentang hasil analisis terkait dengan penilaian negara berdasarkan kriteria yang telah dibobot, dan sintesa penilaian negara prioritas.

### **a. Prioritas Negara Hasil FGD di Jakarta**

Setelah semua peringkat negara berdasarkan tujuh kriteria telah dipaparkan, pembahasan dilanjutkan pada prioritas negara berdasarkan kriteria yang telah dibobot baik pada kegiatan FGD di Jakarta maupun Yogyakarta. Berdasarkan hasil FGD, negara yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan perwakilan dagangnya adalah Singapura, dengan nilai total kriteria terbobot sebesar 0,0313. Sementara Jepang dan Korea Selatan berada di prioritas kedua dan ketiga dengan nilai total kriteria terbobot yang sama yakni 0,0300 (Tabel 7).

Singapura juga menduduki tempat teratas untuk kriteria *Partial Trade Openness* dengan nilai 0,0046. Sementara itu, tiga negara yang menempati urutan nilai *Trade Complementary Index* terbobot tertinggi dengan Indonesia adalah Korea Selatan, Jepang dan Spanyol masing-masing dengan nilai 0,0043 (Tabel 7).

Dengan menggunakan kriteria *market growth*, Myanmar dan Brunei Darussalam menempati urutan pertama dengan nilai *market growth* yang sama yakni 0,0055. Untuk kriteria *market intensity*, Amerika Serikat menempati posisi teratas dengan nilai *market intensity* berbobot sebesar 0,0048.

Kriteria *Logistic Performance Index* (LPI) kembali menempatkan Amerika Serikat dengan nilai tertinggi yaitu 0,0052. Namun Amerika Serikat tidak sendirian, ada 16 negara lain yang memiliki nilai terbobot LPI sama dengan Amerika Serikat yaitu 0,0052. Dengan menggunakan *Country risk* sebagai kriteria penentuan negara prioritas, pada hasil FGD Singapura, Jepang, Korea Selatan dan 12 negara lainnya menduduki tempat teratas dengan nilai 0,0060. Sementara itu, terdapat sembilan negara yang menempati urutan nilai *Trade Cooperation* tertinggi dengan Indonesia diantaranya Singapura, Thailand dan Malaysia masing-masing dengan nilai 0,0049 (Tabel 7).

**Tabel 7. Prioritas Negara Berdasarkan Kriteria yang Telah Dibobot (FGD Jakarta)**

No	Negara	Partial Trade Openness	Trade Complementary Index	Market Growth	Market Intensity	LPI	Country Risk	Trade Cooperation	Priority
	<b>BOBOT</b>	<b>0.1184</b>	<b>0.1224</b>	<b>0.1510</b>	<b>0.1184</b>	<b>0.1673</b>	<b>0.1878</b>	<b>0.1347</b>	
1	Singapura	0.0046	0.0037	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0049	0.0313
2	Jepang	0.0027	0.0043	0.0040	0.0035	0.0052	0.0060	0.0042	0.0300
3	Korsel	0.0033	0.0043	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0042	0.0300
4	Amerika Serikat	0.0027	0.0030	0.0040	0.0048	0.0052	0.0060	0.0028	0.0286
5	Belgia	0.0046	0.0030	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0286
6	Australia	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0042	0.0282
7	Belanda	0.0033	0.0037	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0272
8	Kanada	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0268
9	Thailand	0.0033	0.0030	0.0040	0.0029	0.0044	0.0041	0.0049	0.0267
10	Malaysia	0.0033	0.0030	0.0040	0.0029	0.0044	0.0041	0.0049	0.0267
11	Perancis	0.0027	0.0037	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0266
12	Austria	0.0033	0.0030	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0266
13	RRT	0.0027	0.0030	0.0040	0.0042	0.0044	0.0041	0.0042	0.0266
14	Spanyol	0.0027	0.0043	0.0032	0.0029	0.0052	0.0051	0.0028	0.0263
15	Myanmar	0.0033	0.0037	0.0055	0.0029	0.0027	0.0032	0.0049	0.0262
16	Uni Emirat Arab	0.0040	0.0030	0.0040	0.0029	0.0044	0.0051	0.0028	0.0262
17	Jerman	0.0027	0.0030	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0260
18	Inggris	0.0027	0.0030	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0260
19	Swedia	0.0027	0.0030	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0260
20	Vietnam	0.0040	0.0024	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0049	0.0258
21	Italia	0.0027	0.0037	0.0032	0.0029	0.0052	0.0051	0.0028	0.0257
22	Polandia	0.0033	0.0030	0.0040	0.0029	0.0044	0.0051	0.0028	0.0256
23	Laos	0.0033	0.0037	0.0048	0.0029	0.0027	0.0032	0.0049	0.0254
24	Swiss	0.0027	0.0024	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0254
25	Norwegia	0.0027	0.0024	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0254
26	Brunei Darussalam	0.0027	0.0024	0.0055	0.0029	0.0027	0.0041	0.0049	0.0253
27	India	0.0027	0.0037	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0042	0.0252
28	Kamboja	0.0033	0.0024	0.0048	0.0029	0.0035	0.0032	0.0049	0.0250
29	Pilipina	0.0027	0.0037	0.0040	0.0029	0.0035	0.0032	0.0049	0.0249
30	Afrika Selatan	0.0027	0.0037	0.0040	0.0029	0.0044	0.0041	0.0028	0.0246
31	Argentina	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0035	0.0051	0.0028	0.0241
32	Turki	0.0027	0.0024	0.0040	0.0029	0.0044	0.0041	0.0028	0.0234
33	Brazil	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0028	0.0231
34	Meksiko	0.0027	0.0024	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0028	0.0225
35	Arab Saudi	0.0027	0.0024	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0028	0.0225
36	Nigeria	0.0027	0.0037	0.0032	0.0029	0.0035	0.0032	0.0028	0.0220
37	Rusia	0.0027	0.0024	0.0040	0.0029	0.0027	0.0041	0.0028	0.0217
38	Kolombia	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0027	0.0032	0.0028	0.0213
39	Iran	0.0027	0.0030	0.0032	0.0029	0.0027	0.0032	0.0028	0.0205

Sumber: Hasil Analisis FGD



#### **b. Prioritas Negara Hasil FGD di Yogyakarta**

Pada hasil FGD yang dilaksanakan di Yogyakarta, Singapura masih bertahan di posisi teratas dengan nilai total terbobot dari 7 kriteria sebesar 0,0311. Demikian juga dengan negara prioritas kedua dan ketiga tidak berbeda dengan hasil pada diskusi terbatas, dimana Jepang dan Korea Selatan berada di posisi tersebut dan nilai total yang sama juga dengan diskusi terbatas yakni 0,0300. Pada kriteria *Partial Trade Openness* Singapura dan Belgia paling unggul dengan nilai terbobot 0,0050. Sementara untuk kriteria *Trade Complementary Index*, negara dengan nilai tertinggi yang sudah dibobot untuk kriteria TCI adalah Jepang, Korsel dan Spanyol, masing-masing dengan nilai TCI terbobot 0,0051. Sedangkan untuk

kriteria *market growth* Myanmar dan Brunei Darussalam menempati posisi teratas dengan nilai 0,0052.

Berdasarkan hasil FGD untuk nilai terbobot *market intensity*, Amerika Serikat berada di posisi teratas dengan nilai *market intensity* sebesar 0,0057. Sementara dari kriteria *Logistic Performance Index* pada FGD diperoleh hasil, Singapura dan 16 negara lain memiliki nilai LPI tertinggi dibanding negara lainnya yaitu 0,0045. Hasil FGD untuk *Country Risk* negara Singapura, Jepang, Korsel dan 12 negara lainnya berada di posisi teratas dengan nilai 0,0059. Sementara negara dengan nilai tertinggi untuk kriteria *Trade Cooperation* adalah Singapura, Thailand, Malaysia dan enam negara lainnya, masing-masing dengan nilai TCI 0,0040 (Tabel 8).

**Tabel 8. Prioritas Negara Berdasarkan Kriteria yang Telah Dibobot (FGD Yogyakarta)**

No	Negara	Partial Trade Openness	Trade Complementary Index	Market Growth	Market Intensity	LPI	Country Risk	Trade Cooperation	Priority
	<b>BOBOT</b>	<b>0.1306</b>	<b>0.1469</b>	<b>0.1429</b>	<b>0.1429</b>	<b>0.1429</b>	<b>0.1837</b>	<b>0.1102</b>	
1	Singapura	0.0050	0.0044	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0040	0.0311
2	Jepang	0.0030	0.0051	0.0038	0.0043	0.0045	0.0059	0.0034	0.0300
3	Korsel	0.0037	0.0051	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0034	0.0300
4	Amerika Serikat	0.0030	0.0036	0.0038	0.0057	0.0045	0.0059	0.0023	0.0289
5	Belgia	0.0050	0.0036	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0287
6	Australia	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0034	0.0278
7	Belanda	0.0037	0.0044	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0273
8	Perancis	0.0030	0.0044	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0267
9	Kanada	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0267
10	RRT	0.0030	0.0036	0.0038	0.0050	0.0037	0.0040	0.0034	0.0266
11	Austria	0.0037	0.0036	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0266
12	Spanyol	0.0030	0.0051	0.0030	0.0036	0.0045	0.0050	0.0023	0.0265
13	Thailand	0.0037	0.0036	0.0038	0.0036	0.0037	0.0040	0.0040	0.0264
14	Malaysia	0.0037	0.0036	0.0038	0.0036	0.0037	0.0040	0.0040	0.0264
15	Uni Emirat Arab	0.0044	0.0036	0.0038	0.0036	0.0037	0.0050	0.0023	0.0263
16	Myanmar	0.0037	0.0044	0.0052	0.0036	0.0023	0.0031	0.0040	0.0262
17	Jerman	0.0030	0.0036	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0259
18	Inggris	0.0030	0.0036	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0259
19	Swedia	0.0030	0.0036	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0259
20	Italia	0.0030	0.0044	0.0030	0.0036	0.0045	0.0050	0.0023	0.0257
21	Polandia	0.0037	0.0036	0.0038	0.0036	0.0037	0.0050	0.0023	0.0257
22	Vietnam	0.0044	0.0029	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0040	0.0256
23	Laos	0.0037	0.0044	0.0045	0.0036	0.0023	0.0031	0.0040	0.0255
24	India	0.0030	0.0044	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0034	0.0252
25	Swiss	0.0030	0.0029	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0252
26	Norwegia	0.0030	0.0029	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0252
27	Brunei Darussalam	0.0030	0.0029	0.0052	0.0036	0.0023	0.0040	0.0040	0.0250
28	Pilipina	0.0030	0.0044	0.0038	0.0036	0.0030	0.0031	0.0040	0.0248
29	Afrika Selatan	0.0030	0.0044	0.0038	0.0036	0.0037	0.0040	0.0023	0.0248
30	Kamboja	0.0037	0.0029	0.0045	0.0036	0.0030	0.0031	0.0040	0.0247
31	Argentina	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0030	0.0050	0.0023	0.0243
32	Brazil	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0023	0.0233
33	Turki	0.0030	0.0029	0.0038	0.0036	0.0037	0.0040	0.0023	0.0233
34	Meksiko	0.0030	0.0029	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0023	0.0226
35	Arab Saudi	0.0030	0.0029	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0023	0.0226
36	Nigeria	0.0030	0.0044	0.0030	0.0036	0.0030	0.0031	0.0023	0.0224
37	Rusia	0.0030	0.0029	0.0038	0.0036	0.0023	0.0040	0.0023	0.0218
38	Kolombia	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0023	0.0031	0.0023	0.0216
39	Iran	0.0030	0.0036	0.0030	0.0036	0.0023	0.0031	0.0023	0.0209

Sumber: Hasil Analisis FGD

Berdasarkan sintesa hasil penilaian seluruh kriteria yang telah dibobot pada kegiatan FGD di Jakarta dan Yogyakarta, diperoleh hasil bahwa negara Singapura, Jepang, Korea Selatan merupakan negara yang konsisten berada di tiga besar. Dengan demikian dapat disimpulkan ketiga negara tersebut dapat ditetapkan sebagai calon negara utama yang perlu dimaksimalkan peranan perwakilan dagangnya. Singapura menempati urutan teratas untuk kriteria *Partial Trade Openness* dan *Trade Cooperation*. Sementara Jepang berada di posisi kedua untuk kriteria *Trade Compelementary Index*,

*LPI*, dan *Country risk*, serta peringkat ketiga untuk kriteria *Market intensity*. Korea Selatan berada di posisi teratas untuk kriteria *Trade Compelementary Index*, artinya ekspor Korea Selatan ke Indonesia sudah sesuai dengan kebutuhan impor Indonesia, sedangkan pada kriteria LPI dan *Country risk* Korea Selatan menempati peringkat ketiga. Dari 39 negara yang dianalisis pada dua kegiatan FGD untuk menentukan negara prioritas pengembangan pembukaan perwakilan dagang, diperoleh hasil akhir 19 negara tersebut di Tabel 9. merupakan prioritas utama untuk dikembangkan perwakilan dagangnya.

**Tabel 9. Negara 20 Besar Prioritas**

No	Negara	Atase Perdagangan	ITPC
1	Singapura	1	-
2	Jepang	1	1
3	Korsel	1	1
4	Amerika Serikat	1	2
5	Belgia	1	-
6	Australia	1	1
7	Belanda	1	-
8	Perancis	1	1
9	Kanada	1	1
10	RRT	1	1
11	Austria	-	-
12	Spanyol	1	1
13	Thailand	1	-
14	Malaysia	1	-
15	Uni Emirat Arab	1	1
16	Myanmar	-	-
17	Jerman	1	1
18	Inggris	1	-
19	Swedia	-	-

Sumber: Hasil Analisis

Dari 19 negara yang konsisten berada di 20 besar pada hasil diskusi di Jakarta dan Yogyakarta terdapat tiga negara yang sama sekali belum memiliki perwakilan dagang RI di negara tersebut yaitu Austria, Myanmar dan Swedia. Dengan demikian pemerintah perlu mempertimbangkan pembukaan Atdag dan atau ITPC di ketiga negara tersebut. Sementara negara yang hanya memiliki Atase Perdagangan saja, namun tidak memiliki perwakilan untuk ITPC ada enam yaitu Singapura, Belgia, Belanda, Thailand, Malaysia dan Inggris. Sementara negara yang memiliki ITPC namun tidak memiliki Atase Perdagangan, ternyata tidak ada pada 19 negara terpilih tersebut. Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang memiliki Atase Perdagangan RI dan dua ITPC yang berada di Los Angeles dan Chicago.

Berdasarkan sintesa prioritas negara pengembangan perwakilan perdagangan, diperoleh hasil bahwa negara prioritas yang belum terdapat perwakilan perdagangan, sehingga diusulkan untuk didirikan Atase Perdagangan (Atdag) dan atau ITPC ada tiga (3) negara yaitu Austria, Myanmar dan Swedia.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Urutan kriteria prioritas yang utama untuk membuka perwakilan perdagangan adalah: 1) *country risk*; 2) *commercial infrastructure*; 3) *market growth*; 4) *trade complementary index*; 5) *market intensity*; 6) *trade openness*; dan 7) *trade cooperation*.

Urutan sepuluh besar negara prioritas pengembangan Atdag dan ITPC antara lain: 1) Singapura, 2) Jepang, 3) Korea Selatan, 4) Amerika Serikat, 5) Belgia, 6) Australia, 7) Belanda, 8) Perancis, 9) Kanada, dan 10) RRT. Sebagian besar negara yang menjadi prioritas untuk pengembangan perwakilan perdagangan telah memiliki paling tidak satu perwakilan perdagangan.

Pengembangan perwakilan perdagangan dapat dilakukan dengan penguatan Atdag dan atau ITPC yang sudah ada, dan pembentukan Atdag dan atau ITPC baru. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Atdag dan atau ITPC di tiga negara prioritas yang belum memiliki Atdag dan ITPC yaitu Myanmar, Swedia dan Austria.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dan Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (Puska Daglu), Kementerian Perdagangan yang mengizinkan penulis untuk menggunakan hasil kajiannya untuk dipublikasikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan tim dari Bidang ekspor yang memiliki andil besar dalam penyelesaian kajian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abu-Sarhan, Z. (2011). Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) in The Evaluation and Selection of An

- Information System Reengineering Projects. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 11(1), 172–177.
- Barzekar, G., Aziz, A., Mariapan, M., Ismail, M. H., Hosseni, S. M. (2011). Using Analytical Hierarchy Process (AHP) for Prioritizing and Ranking of Ecological Indicators for Monitoring Sustainability of Ecotourism in Northern Forest, Iran. *Ecologia Balkanica*, 3(1), 59–67.
- Biesebroeck, J. V., Yu, E., Chen, S. (2010). The impact of trade promotion services on Canadian exporter performance pp 145-190. Diunduh dari [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1612209](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1612209).
- Bourgeois, R. (2005). Analytical Hierarchy Process: an Overview, UNCAPSA-UNESCAP, Bogor.
- Chakraborty, T., Ghosh, T., Dan, P. K. (2011). Application of Analytic Hierarchy Process and Heuristic Algorithm in Solving Vendor Selection Problem. *Business Intelligence Journal*, 4(1), 167–177.
- Chamodrakas, I., Batis, D., Martakos, D. (2010). Supplier Selection in Electronic Marketplaces Using Satisficing and Fuzzy AHP. *Expert Systems with Applications*, 37(1), 490–498.
- Ferreira, M. I. V., Teixeira, A. A. (2011). Organizational Characteristics and Performance of Export Promotion Agencies: Portugal and Ireland compared. Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto. Diunduh dari <http://ideas.repec.org/p/por/fepwps/424.html>.
- Global EDGE. (2011). Market Potential Index (MPI). Diunduh dari <http://globaledge.msu.edu/mpi>.
- Hayakawa, K., H.H. Lee, D. Park. (2011). Do Export Promotion Agencies Promote Exports? *IDE Discussion Paper No. 313*.
- Juliyanti, M.I. Irawan, I. Mukhlash. (2011). Pemilihan Guru Berprestasi Menggunakan Metode AHP dan Topsis. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 63-68.
- Justinek, G., Sedej, T. (2012) Measuring Export Support Performance in Slovenia. *International Journal of Diplomacy and Economy*, 1(1): 80-94.
- Kang, K. (2011). Overseas Network of Export Promotion Agency and Export Performance: The Korean Case. *Contemporary Economic Policy*, 29(2), 274–283.
- Kementerian Perdagangan. (2014). Menuju Ekspor 300 Persen di Tahun 2019. Term of Reference.
- Kementerian Perdagangan. (2014). Mapping Reposisi Perwakilan Perdagangan Luar Negeri.
- Kostecki, M., Naray, O. (2007). Commercial Diplomacy and International Business. Netherlands Institute of International Relations' Clingendael'.
- Maharani, P. (2015). Commercial Diplomacy on Export Performance Case Study of Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC). Fulfillment of the requirements for obtaining the degree of Master of

- Arts In Development Studies, Institute of Social Studies, The Netherlands.
- Mardhikawarih, D. A., W.A. Jauhari, C.N. Rosyidi. (2012). Pemilihan Pemasok Drum Pelumas Industri Menggunakan Fuzzy Analytical Hierarchy Process. *Performa*, 11 (1), 67 – 74.
- Marimin. (2004). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Grasindo, Jakarta.
- Martincus, C. V., Carballo, J. (2008). Is Export Promotion Effective in Developing Countries? Firm-Level Evidence on The Intensive and The Extensive Margins of Exports. *Journal of International Economics*, 76(1), 89–106.
- Ngatawi, I. Setyaningsih. (2011). Analisis Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 10 (1), 7-13.
- Nguyen, D. X. (2012). Demand uncertainty: Exporting delays and exporting failures. *Journal of International Economics* 86(1), 336-344.
- Olaru, O. L., Olaru, L. I. (2012). Promotion Techniques in Services Exports. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 1(1), 143-148.
- Ozkan, B., Basligil, H., Sahin, N. (2011). Supplier Selection Using Analytic Hierarchy Process: An Application From Turkey. *Lecture Notes in Engineering and Computer Science*, 2191. Diunduh dari [http://www.iaeng.org/publication/WCE2011/WCE2011\\_pp1160-1165.pdf](http://www.iaeng.org/publication/WCE2011/WCE2011_pp1160-1165.pdf)
- Pareja, S. G., R.L. Vivero, J.A.M. Serrano. (2008). Measuring The Impact Of Regional Export Promotion: The Spanish Case. *Papers in Regional Science*, 87(1), 139-146.
- Prabowo, D. W. (2014). Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process. *Buletin Ilmiah Perdagangan* Vol 8, No. 02 Desember 2014, 163-182.
- Rose, A. K. (2007). The Foreign Service and Foreign Trade: Embassies as Export Promotion. *The World Economy*, 30(1), 22–38.
- Ruel, H., Visser, R. (2012). Commercial diplomats as corporate entrepreneurs: explaining role behaviour from an institutional perspective. *International Journal of Diplomacy and Economy*, 1(1): 42-79.
- Ruël, H. J. M., Zuidema, L. (2012). The Effectiveness of Commercial Diplomacy; A Survey Among Dutch Embassies and Consulates. *Clingendael Discussion Papers Series*, (123), 1–54.
- Saaty, R. W. (1987). The Analytic Hierarchy Process—What It is and How It is Used. *Mathematical Modelling*, 9(3), 161–176.
- Setyawan, R.K. (2014). Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process dalam Pendukung Keputusan Investasi Perumahan berdasarkan Lokasi. Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika S-1 Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Susila, W. R., Munadi, E. (2007). Penggunaan Analytical Hierarchy Process untuk Penyusunan Prioritas Proposal Penelitian. *Informatika Pertanian*, 16(2), 983–998.

Titus, O. A., Samuel, D., Ajao, O. S. (2013). A Comparative Analysis of Export Promotion Strategies in Selected African Countries (South Africa, Nigeria and Egypt). *International Journal of Management Sciences*, 1(6), 204-211.

Yang, Z., Su, C., Fam, K. S. (2012). Dealing with Institutional Distances in International Marketing Channels: Governance Strategies That Engender Legitimacy and Efficiency. *Journal of Marketing*, 76(3), 41-55.